

# SISTIM GADUHAN SAPI TRADISIONAL BALI: FAKTOR PENDORONG, PENOPANG DAN KARAKTERISTIKNYA

Pantjar Simatupang<sup>1)</sup>, Erizal J.<sup>2)</sup>, M. H. Togatorop<sup>3)</sup>

## Abstrak

Sistim gaduhan sapi tradisional merupakan salah satu bentuk lembaga usaha ternak yang berkembang luas di pulau Bali. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa sistim gaduhan sapi tradisional tersebut berkembang karena didorong oleh adanya kebutuhan ekonomi dan ditopang oleh nilai sosial yang disebut karmaphala. Masyarakat Bali berpendapat bahwa sistim gaduhan sapi tradisional tersebut lebih baik daripada pola gaduhan modern seperti PIR karena lebih adil, lebih kooperatif, personal dan transparan. Oleh karena itu lembaga ekonomi formal seperti pola usaha Bapak-Angkat kiranya direkayasa dengan mengacu pada sistim gaduhan sapi tradisional tersebut.

## PENDAHULUAN

Masyarakat Bali tergolong sangat kuat mempertahankan nilai-nilai tradisional yang bersumber dari agama Hindu. Hal itu dibuktikan oleh kenyataan bahwa pulau Bali merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia dimana agama Hindu tetap merupakan agama yang paling dominan. Nilai-nilai ajaran agama Hindu seperti kejujuran, karmaphala (ganjaran sesuai dengan perbuatan) dan keadilan merupakan tatanan yang kuat bagi terciptanya dan langgengnya berbagai kelembagaan ekonomi tradisional di daerah ini.

Dalam bidang usaha ternak, lembaga ekonomi tradisional yang paling luas berkembang di pulau Bali ialah sistim gaduhan sapi Bali yang dalam bahasa lokal disebut sistim kadasan. Sistim gaduhan sapi tradisional ini ternyata mampu bertahan dan tetap berkembang di tengah-tengah lingkungan ekonomi yang mengalami proses modernisasi dengan pesat. Bahkan sistim gaduhan tradisional ini nampaknya lebih tangguh dari sistim gaduhan modern seperti sistim perusahaan inti rakyat (PIR) yang ditunjang oleh pemerintah. Sinyalemen ini dibuktikan oleh fakta yang menunjukkan bahwa sistim PIR formal cenderung mengalami penurunan walaupun mendapat dukungan langsung dari pemerintah sedangkan sistim gaduhan tradisional

tetap berkembang walaupun praktis tidak mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah (Simatupang, Jamal dan Togatorop, 1992).

Ketanggungan sistim gaduhan sapi Bali sungguh menarik untuk ditelaah. Menurut hemat kami, pengetahuan tentang faktor kunci ketangguhan lembaga ekonomi tradisional ini dapat dipakai sebagai acuan dalam merencanakan lembaga-lembaga ekonomi baru seperti sistim PIR. Dalam tulisan ini akan diuraikan pola-pola sistim gaduhan sapi yang ada di Bali yang mencakup faktor pendorong, perikatan pemilik-pemelihara, ketentuan bagi hasil, proses pembentukan dan tatalaksana sistim gaduhan sapi tradisional tersebut.

## METODA PENELITIAN

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang Agribisnis Komoditas Peternakan, yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian pada bulan Februari 1992.

<sup>1)</sup> Ahli Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

<sup>2)</sup> Ajun Peneliti Muda pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

<sup>3)</sup> Peneliti Madya pada Puslitbang Peternakan.

Penelitian dilakukan di Propinsi Bali, dengan pengamatan khusus di dua kabupaten yaitu Kabupaten Badung dan Klungkung. Untuk Kabupaten Badung penelitian dilakukan di desa Pelaga, Kecamatan Petang, sedangkan untuk Kabupaten Klungkung di desa Aan dan Tihingan, Kecamatan Banjarangkan.

Data dan informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- Petani pelaksana pemeliharaan sapi.
- Kelompok peternak pelaksana PIR.
- Pedagang sapi lokal, pedagang antar pulau dan pengelola pasar hewan.
- Perusahaan pelaksana PIR sapi potong.
- Dinas dan instansi terkait.

### **FAKTOR PENDORONG PERKEMBANGAN SISTIM GADUHAN SAPI**

Sistim gaduhan sapi merupakan suatu usaha bersama antara pemilik modal (pemilik sapi) yang menyediakan sapi piaraan dan pekerja yang memelihara sapi tersebut. Bagi pemilik sapi, sistim gaduhan merupakan wahana untuk melakukan investasi produktif (menanam modal). Sedangkan bagi pemelihara sapi, sistim gaduhan merupakan wahana untuk menciptakan lapangan kerja bagi keluarga, yang selanjutnya berarti merupakan wahana untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Dengan memandang usaha ternak sapi sebagai usaha investasi produktif maka dapatlah dikatakan bahwa sistim gaduhan merupakan suatu alat intermediasi kapital. Secara kasar sistim gaduhan sapi dapat dianalogikan sebagai ventura kapital informal. Dengan alur pemikiran ini kiranya dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab dari berkembangnya sistim gaduhan sapi ialah belum berkembangnya lembaga keuangan di daerah pedesaan. Dengan perkataan lain, sistim sapi gaduhan merupakan suatu lembaga ekonomi informal yang muncul untuk mengisi kebutuhan masyarakat akan perlunya intermediasi kapital. Jelaslah bahwa munculnya sistim gaduhan sapi di pulau Bali sesuai dengan teori institusi terdorongkan (induced institution) seperti yang diutarakan oleh Hayami dan Ruttan (1985) dan Gertz (1966).

Belum berkembangnya lembaga keuangan desa merupakan alasan umum pendorong perkembangan sistim gaduhan sapi. Faktor-faktor pendorong lainnya dapat ditelusuri dari sisi pemilik maupun dari sisi pemelihara sapi. Untuk itu akan lebih tepat

apabila tinjauan dilakukan berdasarkan ciri utama pemilik maupun pemelihara sapi tersebut.

Pemilik sapi gaduhan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu:

- (1) Peternak sapi skala "besar"
- (2) Orang kaya desa (investor)
- (3) Pedagang.

Peternak sapi skala "besar" menggaduhkan sapinya terutama karena ia tidak sanggup memelihara sendiri seluruh sapi yang dimiliki. Sebagaimana diketahui, usaha ternak yang ada di pedesaan Bali adalah usaha keluarga yang hanya mengandalkan tenaga kerja keluarga dan praktis hanya mengandalkan sumber pakan hijauan dari ladang sendiri. Oleh karena itu kapasitas keluarga untuk memelihara sapi pun akan terbatas karena adanya kendala tenaga kerja dan sumber pakan tersebut. Apabila seorang pemilik sapi memiliki sapi lebih banyak dari kapasitas kemampuannya maka ia akan menggaduhkan sapi sebanyak kelebihan kapasitas tersebut. Jadi dalam konteks ini, munculnya sistim gaduhan adalah akibat dari usaha ternak yang berbentuk usaha keluarga, disamping terbatasnya alternatif investasi produktif.

Bagi pemilik ternak orang kaya desa, sistim ini praktis hanya untuk wahana investasi. Bagi kelompok ini penyebab munculnya sistim sapi gaduhan ialah belum berkembangnya lembaga keuangan desa dan terbatasnya alternatif investasi riil di daerah pedesaan. Sedangkan bagi pedagang-pemilik sapi, alasan utama untuk menggaduhkan sapi ialah untuk investasi dan untuk mengelak penurunan harga (hedging). Dengan demikian seorang pedagang menggaduhkan sapinya terutama adalah karena adanya fluktuasi harga sapi musiman yang cukup menguntungkan untuk melakukan investasi pada sapi gaduhan. Pedagang ini membeli sapi untuk digaduhkan pada saat harga rendah dan kemudian menjualnya pada saat harga tinggi.

Pemeliharaan sapi gaduhan pada umumnya adalah keluarga yang relatif miskin. Jadi mereka menggaduh sapi untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan angkatan kerja keluarga dan potensi produksi pakan hijauan yang dimiliki. Perlu dikemukakan bahwa bagi pemelihara sapi gaduhan, usaha ternak sapi hanyalah sebagai pengisi waktu luang keluarga. Dengan lebih tegas dapatlah dikatakan bahwa faktor pendorong suatu keluarga menggaduh sapi ialah pendapatan yang masih rendah, adanya potensi produksi pakan yang belum dimanfaatkan dan masih belum penuhnya penggunaan angkatan kerja keluarga.



**PERPUSTAKAAN**  
Pusat Penelitian<sup>51</sup>  
Sosial Ekonomi Pertanian  
**BOGOR**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong munculnya sistim gaduhan sapi ialah:

- (1) Belum berkembangnya lembaga keuangan desa.
- (2) Bentuk usaha ternak yang masih bersifat usaha keluarga.
- (3) Terbatasnya alternatif investasi riil di pedesaan.
- (4) Fluktuasi harga sapi musiman yang cukup besar.
- (5) Masih banyaknya keluarga berpendapatan rendah.
- (6) Desa bersangkutan punya potensi produksi.

### **PERIKATAN ANTARA PEMILIK DAN PEMELIHARA SAPI**

Semua faktor-faktor tersebut di atas dapat dipandang sebagai syarat keharusan untuk mendorong perkembangan sistim gaduhan. Faktor-faktor tersebut masih perlu ditunjang oleh nilai-nilai sosial yang kondusif. Nilai-nilai sosial inilah yang menjadi penjamin ikatan yang kuat dan efisien diantara pemilik dan pemelihara sapi. Nilai-nilai sosial ini mungkin saja berakar dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat seperti yang akan dibahas berikut ini.

Sebagai layaknya sebuah lembaga tradisional, perikatan pada sistim gaduhan sapi Bali bersifat informal. Seluruh perjanjian antara pemilik dan pemelihara sapi berbentuk permufakatan verbal, sama sekali tidak ada yang tertulis. Jadi landasan perikatan ialah permufakatan dan saling mempercayai. Perikatan seperti ini tentu tidak mempunyai kekuatan hukum formal. Sudah barang tentu perikatan informal demikian hanya dapat bertahan apabila ditunjang oleh nilai-nilai sosial yang sesuai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Oleh karena landasannya hanyalah saling mempercayai maka sistim gaduhan hanya terjalin antara pemilik dan pemelihara sapi yang betul-betul saling mengenal. Oleh karena itu, pemilik dan pemelihara sapi biasanya mempunyai hubungan kekeluargaan atau hidup bertetangga. Hubungan kekeluargaan merupakan jaminan perikatan yang paling kuat. Sesama saudara tentu saling mengasihi. Sedangkan dengan hidup bertetangga maka pemilik dan pemelihara sapi bukan hanya memberikan keyakinan yang tinggi tentang sifat dan perilaku masing-masing tetapi juga memudahkan pemilik

untuk mengontrol tatalaksana pemeliharaan sapi.

Hubungan keluarga atau rukun tetangga dapat dipandang sebagai faktor pelengkap bagi jaminan terlaksananya perikatan informal tersebut dengan dasar nilai-nilai agama Hindu yang disebut karmaphala. Karmaphala merupakan nilai kepercayaan bahwa perbuatan seseorang akan memperoleh pahala atau ganjaran yang setimpal. Masih dalam konteks hukum karma, perbuatan seseorang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu subhakarma dan ashubakarma. Subhakarma ialah kepercayaan bahwa perbuatan baik akan senantiasa mendapat imbalan (karunia) yang baik pula dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kepercayaan Subhakarma merupakan faktor pendorong untuk berbuat baik. Sedangkan ashubakarma merupakan kepercayaan bahwa perbuatan buruk akan mendatangkan hukuman (kutukan) yang setimpal dari Tuhan. Kepercayaan ashubakarma merupakan faktor pencegah bagi penganutnya untuk menjauhkan diri dari perbuatan jahat dan curang.

Kiranya jelas bahwa kepercayaan karmaphala merupakan nilai-nilai sosial yang sangat ideal untuk menopang lembaga-lembaga ekonomi informal termasuk sistim gaduhan sapi. Subhakarma merupakan faktor pendorong pertumbuhan produktivitas dan efisiensi karena mendorong setiap warga masyarakat untuk senantiasa bekerja keras dan berbuat baik. Sedangkan ashubakarma merupakan faktor pelindung yang mencegah warga masyarakat untuk berbuat yang tidak baik dan curang.

### **KETENTUAN BAGI HASIL**

Ketentuan bagi hasil pada sistim gaduhan sapi tradisional Bali tergantung pada jenis sapi awal (bakalan) yang dipelihara. Apabila sapi bakalan jantan maka ketentuan bagi hasil didasarkan pada nilai tambah kotor, sedangkan apabila sapi bakalan betina maka ketentuan bagi hasil didasarkan pada anak yang lahir. Namun jika sapi bakalan betina mandul maka ketentuan bagi hasil akan didasarkan pada nilai tambah. Secara spesifik aturan umum bagi hasil pada sistim gaduhan sapi tradisional Bali ditampilkan pada Tabel 1. Perlu dicatat bahwa bagi hasil tersebut didasarkan pada nilai kotor yaitu tanpa mengeluarkan biaya modal dan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh pemilik dan pemelihara sapi. Aturan bagi hasil yang ditampilkan pada Tabel 1 merupakan ketentuan umum yang

Tabel 1. Ketentuan bagi hasil pada sistim sapi gaduhan tradisional Bali.

Jenis sapi	Penerimaan kotor pemeliharaan sapi (penggaduh)	Penerimaan kotor pemilik bakalan sapi (investor)
Sapi jantan	$1/2(N_1 - N_0)$	$N_0 + 1/2(N_1 - N_0) = 1/2(N_1 + N_0)$
Sapi betina subur		
1. Muda (lepas sapih)	Anak pertama	Anak kedua + induk
2. Dewasa	Anak kedua	Anak pertama + induk
Sapi betina mandul	$1/2(N_1 - N_0)$	$N_0 + 1/2(N_1 - N_0) = 1/2(N_1 + N_0)$

Keterangan:

$N_0$  = nilai (harga) nominal sapi pada awal gaduhan

$N_1$  = nilai (harga) nominal sapi pada akhir gaduhan.

dapat bervariasi menurut kesepakatan antara penggaduh dan pemilik sapi.

Disamping memperoleh bagian yang pasti seperti yang diatur pada ketentuan bagi hasil (Tabel 1), penggaduh seringkali juga memperoleh bonus dari pemilik sapi yang disebut sebagai uang "pengganti sabit". Besarnya bonus ini tergantung pada kerelaan si pemilik sapi. Biasanya pemilik sapi hanya memberikan bonus kepada penggaduh yang dipandang cukup berhasil. Jadi bagi penggaduh, bonus yang diperolehnya merupakan suatu penghargaan dari pemilik sapi sehingga dapat merupakan faktor pendorong kerja pada usaha sapi gaduhan selanjutnya.

Ketentuan bagi hasil tersebut di atas dipandang adil oleh masyarakat setempat<sup>4)</sup>. Bagi mereka, suatu ketentuan bagi hasil dipandang adil apabila untuk suatu usaha yang biayanya ditanggung sama rata maka sisa hasil usahanya dibagi sama rata pula. Oleh karena itu ketentuan bagi hasil untuk usaha sapi gaduhan dengan sapi bakalan jantan dan betina mandul adalah pertambahan nilai sapi (nilai produksi kotor) dibagi dua dengan pemikiran (subjektif) bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh pemilik sapi (biaya modal) adalah setara dengan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh penggaduh.

Pandangan yang sama juga berlaku untuk sapi bakalan betina subur. Produk yang dihasilkan dari usaha ternak sapi betina ialah anak. Oleh karena itu untuk gaduhan sapi betina subur yang dibagi dua ialah anak yang lahir. Apabila sapi bakalan adalah betina muda (lepas sapih) maka si penggaduh haruslah memelihara sapi tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama daripada sapi bakalan betina dewasa untuk menghasilkan dua ekor anak. Oleh karena itu, demi keadilan maka

pada pola gaduhan sapi betina muda si penggaduh haruslah memperoleh anak pertama, sedangkan pada pola gaduhan sapi betina dewasa si penggaduh memperoleh anak kedua.

## PROSES PEMBENTUKAN

Suatu usaha ternak sapi gaduhan diawali dengan kesepakatan keinginan antara pemilik dan pemelihara ternak. Inisiasi untuk mencapai permufakatan ini dapat berjalan dari dua arah yaitu si calon pemelihara ternak yang pertama kali menghubungi si pemilik ternak atau si pemilik ternak yang mengambil inisiatif pertama mencari si calon pemelihara ternak. Baik calon pemilik maupun calon pemelihara sapi bebas menerima atau menolak permintaan atau penawaran yang diajukan kepadanya. Dapatlah dikatakan bahwa proses permufakatan terjadi melalui suatu transaksi bebas.

Oleh karena kelangkaan modal, jumlah sapi yang ditawarkan untuk digaduhkan relatif lebih sedikit daripada permintaannya. Kelebihan permintaan ini membuat timbulnya persaingan yang kuat diantara para calon pemelihara sapi gaduhan. Persaingan ini mendorong mereka senantiasa bekerja sangat giat dan tekun memelihara setiap sapi yang digaduhnya. Pemelihara sapi yang dikenal berprestasi baik akan lebih mudah untuk memperoleh sapi gaduhan. Peternak sapi berprestasi pada umumnya memperoleh tawaran, sehingga tidak perlu mencari sapi gaduhan.

<sup>4)</sup> Analisis yang dilakukan oleh Simatupang (1993) membuktikan bahwa ketentuan bagi hasil gaduhan sapi tradisional Bali lebih adil daripada ketentuan bagi hasil PIR.

Persaingan yang mendorong para pemelihara sapi gaduhan untuk bekerja lebih keras tentu sangat kondusif untuk meningkatkan efisiensi usaha. Oleh karena itu, walaupun tidak diteliti secara khusus, menurut hemat kami sistem sapi gaduhan di Bali tidak akan menimbulkan inefisiensi seperti yang seringkali muncul pada usahatani sistem gaduhan pada umumnya. Sebaliknya, adalah sangat mungkin bahwa sistem gaduhan sapi Bali bahkan meningkatkan efisiensi usaha. Sinyalemen ini tentu masih merupakan suatu hipotesis yang perlu diteliti secara khusus.

### **PENGADAAN FAKTOR PRODUKSI DAN PEMBAGIAN KERJA**

Faktor-faktor produksi yang diperlukan pada usaha ternak sapi ialah sapi piaraan, kandang, pakan (hijauan makanan ternak) dan tenaga kerja. Pada sistem gaduhan sapi Bali, penyediaan sapi bakalan yang dipelihara merupakan tanggung jawab si pemilik sapi (investor). Sedangkan kandang, pakan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memelihara sapi merupakan tanggung jawab si penggaduh (pemelihara) sapi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa si pemilik sapi hanya berkewajiban menanggung biaya modal penyediaan sapi, sedangkan segala biaya pemeliharaan sapi ditanggung oleh si penggaduh.

Salah satu ciri sistem gaduhan sapi Bali yang paling menarik ialah dalam hal pengambilan keputusan yang selalu berdasarkan saling mempercayai melalui proses musyawarah. Kedua belah pihak (penggaduh dan pemelihara ternak) senantiasa berupaya sejauh mungkin mengurangi perselisihan paham. Hal ini sangat jelas terlihat pada proses pembelian sapi bakalan (bibit) dan penjualan ternak, dua titik paling rawan sumber perbedaan pendapat.

Sapi bakalan yang digaduhkan dapat berasal dari sapi yang telah ada dimiliki si pemilik atau sapi yang masih harus dibeli di pasar. Untuk keperluan penentuan bagi hasil pada akhir gaduhan, nilai awal dari sapi bakalan haruslah disepakati sebelumnya, kecuali sapi bakalan tersebut betina dewasa. Apabila sapi bakalan tersebut sudah ada dimiliki maka harga awal akan ditentukan berdasarkan harga tawaran pedagang setempat. Pada prinsipnya, penggaduh (pemelihara) haruslah bersaing harga dengan pedagang setempat untuk memper-

oleh sapi gaduhannya. Si penggaduh dapat menolak apabila harga sapi bakalan dirasakan terlalu tinggi. Dengan demikian, baik pemilik maupun penggaduh sama-sama puas tentang tingkat harga awal dari sapi gaduhan tersebut.

Apabila sapi bakalan masih belum ada maka si calon pemilik (investor) dan penggaduh (pemelihara) akan pergi bersama-sama ke pasar untuk membelinya. Mereka akan saling bermusyawarah menentukan sapi bakalan yang dipandang bermutu baik dan dengan harga yang memadai. Ikut sertanya penggaduh untuk memilih secara langsung sapi bakalan merupakan salah satu keunggulan sistem gaduhan sapi tradisional Bali dibandingkan dengan sistem PIR formal mengingat mutu sapi bakalan merupakan faktor penentu utama keuntungan bagi si penggaduh. Sebagaimana diketahui pada sistem PIR formal, si penggaduh tidak ikut secara langsung dalam pembelian sapi bakalan.

Waktu jual (untuk gaduhan sapi jantan dan betina mandul) juga ditetapkan secara musyawarah. Kedua belah pihak bebas mengajukan usul tentang waktu penjualan ini. Apabila si penggaduh mempunyai kebutuhan uang yang sangat mendesak sehingga mengusulkan untuk menjual ternak gaduhan, tetapi si pemilik merasa belum tepat waktu untuk menjualnya, maka si pemilik sapi tersebut dapat memberikan pinjaman uang sementara kepada si penggaduh sehingga penjualan sapi tersebut dapat ditunda. Mekanisme penjualan seperti ini membuat waktu penjualan sapi gaduhan bersifat fleksibel dan memuaskan kedua belah pihak. Waktu penjualan yang fleksibel ini merupakan keunggulan lain dari sistem gaduhan sapi tradisional dibandingkan dengan sistem PIR formal. Pada sistem PIR formal waktu penjualan telah ditetapkan dalam surat perjanjian sehingga tidak fleksibel. Bahkan dalam prakteknya si inti seringkali yang menentukan waktu jual sapi piaraan.

Setelah waktu penjualan sapi telah disepakati maka si penggaduh dan si pemilik akan secara bersama-sama membawa sapi tersebut ke pasar. Kedua belah pihak sama-sama menetapkan harga dan dengan demikian sama-sama tahu harga jual sesungguhnya. Jadi kedua belah pihak sama-sama puas dan sama sekali tidak ada peluang timbulnya kecurangan. Perlu ditambahkan bahwa dalam kenyataannya mungkin saja yang melakukan penjualan hanyalah si pemilik sapi. Hal ini dapat terjadi jika si penggaduh memang telah percaya betul kepada si pemilik sapi tersebut.

## **PERTANGGUNGAN RESIKO KEMATIAN**

Sebagai suatu usaha budidaya, usaha ternak sapi gaduhan tidaklah bebas murni dari resiko kematian ternak. Penyebab kematian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu : (a) akibat sakit dan kecelakaan alam yang tidak dapat dihindari; (b) akibat kecelakaan karena kelalaian si penggadu. Pertanggungungan resiko kematian pada sistim gaduhan tradisional Bali diatur berdasarkan penyebab kematian tersebut.

Ketentuan umum ialah bahwa si penggadu wajib melaporkan segera kepada si pemilik sapi apabila ditemukan ada indikasi penyakit atau kecelakaan alam yang mengancam hidup sapi gaduhan. Apabila sapi gaduhan mati karena penyakit dan kecelakaan alam yang tidak dapat dihindari si penggadu dan hal ini telah dilaporkan sebelumnya kepada si pemilik, maka si penggadu tersebut sama sekali tidak turut menanggung segala kerugian materil yang ditimbulkan oleh kematian sapi gaduhan tersebut. Tetapi apabila kematian sapi gaduhan tersebut terjadi akibat penyakit yang tidak segera dilaporkan kepada si pemilik atau karena kecelakaan yang timbul karena kelalaian si penggadu, maka si penggadu wajib mengganti kerugian modal kepada si pemilik sapi yaitu sebesar nilai awal sapi bakalan tersebut. Untuk kasus yang terakhir ini jarang sekali terjadi.

Sistim pertanggungungan resiko seperti tersebut di atas dipandang adil oleh masyarakat pedesaan Bali. Prinsip keadilan yang dianut ialah "ringan sama dijinjing, berat sama dipikul" dan "siapa yang berbuat dialah yang menanggung akibatnya". Jadi pada kasus kematian sapi gaduhan akibat penyakit yang tidak dapat dihindari misalnya, si penggadu sama sekali tidak dapat dipersalahkan. Kematian semacam ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu kerugian yang ditimbulkannya pun harus dipikul bersama. Dalam hal ini si pemilik sapi menanggung kerugian kehilangan modalnya (sapi bakalan) sedangkan si penggadu mengalami kerugian senilai biaya pemeliharaan yang dikeluarkan (uang atau tenaga kerja) selama sapi tersebut hidup.

Kesepakatan persepsi bahwa aturan pertanggungungan resiko pada sistim sapi gaduhan tradisional adalah adil merupakan salah satu faktor kunci kenapa sistim gaduhan tradisional mampu bertahan dan bahkan berkembang terus di pulau Bali. Pada umumnya para penggadu adalah keluarga miskin yang sangat enggan menerima resiko. Hal inilah

salah satu alasan kenapa para penggadu lebih menyukai sistim gaduhan tradisional daripada sistim PIR formal. Bagi para penggadu sistim PIR formal terlalu berbahaya karena resiko kematian sapi piaraan ditanggung oleh si penggadu melalui pinjaman dari kelompok taninya.

## **KESIMPULAN**

Sistim gaduhan sapi tradisional Bali merupakan suatu lembaga ekonomi informal yang telah teruji mampu bertahan dari zaman dahulu kala hingga kini. Lembaga ini berkembang karena didorong oleh keadaan ekonomi pedesaan dimana lembaga keuangan desa belum berkembang dan penduduk desa masih banyak yang masih hidup dalam kemiskinan. Hal ini membuat orang kaya desa menginvestasikan modalnya dalam sapi gaduhan (penawaran sapi gaduhan) dan penduduk miskin membutuhkan (permintaan) sapi gaduhan tersebut.

Disamping didorong oleh kebutuhan ekonomi, sistim gaduhan tersebut dapat berkembang karena ditopang oleh nilai sosial yang disebut karmaphala. Dengan demikian kelembagaan sistim sapi gaduhan berkembang karena perpaduan antara kebutuhan ekonomi dan tatanan nilai sosial.

Sistim gaduhan tradisional terbukti lebih disukai oleh para petani penggadu sapi dibandingkan dengan sistim gaduhan formal PIR. Bagi para petani penggadu, sistim gaduhan tradisional memiliki berbagai keunggulan seperti: lebih adil lebih kooperatif dan lebih transparan (terbuka). Ketiga ciri ini merupakan kunci utama bagi kelanggengan sistim gaduhan sapi tradisional. Oleh karena itu, ketiga ciri ini kiranya perlu dimasukkan pada setiap rekayasa lembaga ekonomi formal agar lebih mudah diterima masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Geertz, C. 1966. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. University of California Press.
- Hayami, Y. and V.W. Ruttan. 1985. *Agricultural Development: An International Perspective*. John Hopkins University Press.
- Simatupang, P. 1993. *Analisis Ekonomi Perbandingan Sistim Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Potong Pola PIR dengan Pola Gaduhan Tradisional di Propinsi Bali*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Simatupang, P., E. Jamal dan M.H. Togatorop. 1992. *Penelitian an Agribisnis Peternakan, Buku I: Sapi Potong di Propinsi Bali*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.